

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL PADA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Ida Ayu Candra Yunita Sari¹
Ni Luh Supadmi²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia
e-mail:chandrayunita93@yahoo.com/telp:+62 85858267726

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali, Indonesia

ABSTRAK

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diberlakukan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam menambah pendapatan daerah dan melaksanakan manfaat alokatif sehingga dapat menetapkan prioritas pembangunan daerah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh PAD dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini dilakukan di 9 kabupaten/kota yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini, yaitu laporan realisasi APBD tahun 2009-2013 dan data IPM tahun 2008-2013. Syarat uji asumsi klasik dan uji kelayakan model, telah terpenuhi dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Pengaruh positif dan signifikan ini berarti semakin meningkat PAD dan Belanja Modal, maka peningkatan IPM juga meningkat. Terjadinya peningkatan disebabkan oleh pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal telah dimanfaatkan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, alokasi belanja modal, indeks pembangunan manusia

ABSTRACT

Regional autonomy and fiscal decentralization enacted to give local governments the authority to increase local revenue and allocative function in local development priorities. This study purpose to determine effect of PAD and Capital Expenditure on Improving Human Development Index/HDI (Study at Regency/City in Bali). This study was conducted in 9 Regency/cities in Bali. This study uses budget realization report from 2009-2013 and HDI data 2008-2013. This research has been qualified classical assumption and test feasibility of model, processed by regression analysis techniques. Based on hypothesis test showed PAD and Capital Expenditure positive and significant impact on Improvement of HDI. Positive and significant effect of this means increased revenues and capital expenditures, will be increase HDI also. This increase is due to the allocation of Local Revenue and Capital Expenditure has been utilized appropriately so that planned activities can be well.

Keywords: local revenue, capital expenditure, human development index

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia diartikan sebagai “a process of enlarging people’s choices” yang merupakan tahapan dalam peningkatan taraf hidup manusia. Hal ini

terungkap dalam publikasi *United Nations Development Programme* (UNDP) melalui *Human Development Report* tahun 1996 tentang Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia ini mengutamakan adanya empat unsur diantaranya produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). IPM dilihat berdasarkan 3 faktor utama, yaitu faktor kesehatan, pendidikan dan pendapatan. IPM dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator dasar, yaitu: usia, ilmu yang dimiliki, dan kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Ketiga unsur tersebut tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi berpengaruh satu sama lain.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa IPM dinilai berdasarkan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi, kemampuan untuk menjaga kesehatan, mempunyai keterampilan sehingga memperoleh pendapatan yang layak untuk membiayai kebutuhannya. Menurut catatan BPS di Bali, IPM di seluruh daerah cenderung mengalami kenaikan. Berikut data yang berkaitan dengan Peningkatan IPM seluruh daerah di Provinsi Bali dari 2009–2013 disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 Rata-rata tertinggi peningkatan IPM di daerah Bali adalah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Karangasem dengan rata-rata peningkatan yang sama besar, yaitu 0,60 sedangkan peningkatan IPM seluruh daerah di Provinsi Bali yang terendah adalah Kabupaten Jembrana, Badung dan Kota Denpasar sebesar 0,45.

Tabel 1.
Peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

| Kabupaten | Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia | | | | | Rata-rata |
|------------|--|-------|------|------|------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Buleleng | 0.59 | 0.43 | 0.43 | 0.81 | 0.61 | 0.57 |
| Jembrana | 0.43 | 0.24 | 0.49 | 0.44 | 0.67 | 0.45 |
| Tabanan | 0.53 | 0.31 | 0.67 | 0.31 | 0.64 | 0.49 |
| Badung | 0.37 | -2.47 | 3.33 | 0.34 | 0.68 | 0.45 |
| Gianyar | 0.43 | 0.30 | 0.70 | 1.06 | 0.53 | 0.60 |
| Bangli | 0.49 | 0.50 | 0.71 | 0.38 | 0.48 | 0.51 |
| Klungkung | 0.53 | 0.35 | 0.48 | 0.74 | 0.49 | 0.53 |
| Karangasem | 0.60 | 0.36 | 0.65 | 0.76 | 0.64 | 0.60 |
| Denpasar | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.45 |

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2015

IPM dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah dan merupakan penilaian terhadap pemerataan pembangunan sudah berjalan dengan baik. Sumber dana yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Semakin mandiri suatu daerah berarti Pendapatan Asli Daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya. Data berkaitan dengan PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2 PAD terendah di Provinsi Bali diperoleh Kabupaten Bangli, sedangkan PAD tertinggi adalah Kabupaten Badung dan posisi kedua PAD tertinggi adalah Kota Denpasar. Apabila dibandingkan dengan Peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, justru Peningkatan IPM Kabupaten Badung dan Kota Denpasar berada pada peringkat terbawah PAD seluruh daerah Bali yang terus meningkat setiap tahunnya semestinya dibarengi dengan peningkatan

IPM karena daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk menaikan sektor-sektor yang mendorong peningkatan IPM.

Tabel 2.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

| Kabupaten | Pendapatan Asli Daerah (dalam Miliar Rupiah) | | | | |
|------------|--|---------|-----------|-----------|-----------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Buleleng | 63,458 | 86,962 | 109,167 | 129,003 | 160,384 |
| Jembrana | 23,324 | 34,340 | 41,330 | 46,470 | 68,485 |
| Tabanan | 93,444 | 116,860 | 141,046 | 183,295 | 255,418 |
| Badung | 850,170 | 979,194 | 1.466,298 | 1.872,346 | 2.279,113 |
| Gianyar | 112,540 | 153,559 | 209,598 | 261,222 | 319,612 |
| Bangli | 16,301 | 16,252 | 22,963 | 40,751 | 56,661 |
| Klungkung | 29,566 | 31,331 | 40,735 | 48,561 | 67,401 |
| Karangasem | 47,842 | 62,696 | 129,556 | 144,019 | 168,652 |
| Denpasar | 215,156 | 260,482 | 424,959 | 551,326 | 658,974 |

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2015

Strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Data berkaitan dengan Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan Belanja Modal tertinggi adalah Kabupaten Badung, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bangli. Pengalokasian Belanja Modal ini sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh masing-masing daerah dimana PAD tertinggi yaitu Kabupaten Badung, terendah juga masih dari kabupaten yang sama yaitu Kabupaten Bangli. Pengalokasian belanja modal ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Tabel 3.
Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

| Kabupaten | Belanja Modal (dalam Miliar Rupiah) | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Buleleng | 102,442 | 47,207 | 121,895 | 79,433 | 185,896 |
| Jembrana | 92,897 | 58,163 | 67,493 | 134,613 | 142,563 |
| Tabanan | 77,334 | 74,637 | 70,442 | 138,723 | 128,186 |
| Badung | 445,014 | 176,302 | 199,704 | 627,705 | 766,712 |
| Gianyar | 158,563 | 109,959 | 104,130 | 120,627 | 185,323 |
| Bangli | 48,263 | 68,608 | 114,687 | 82,340 | 62,762 |
| Klungkung | 82,507 | 42,555 | 49,010 | 81,223 | 93,418 |
| Karangasem | 141,782 | 77,507 | 118,836 | 171,630 | 180,737 |
| Denpasar | 88,378 | 65,756 | 88,771 | 206,143 | 254,008 |

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, 2015

Upaya peningkatan IPM tidak akan lepas dari peran wakil rakyat di daerah dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah pada belanja daerah untuk sektor-sektor yang dapat menaikkan IPM seperti bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah daerah diharapkan dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya daerah masing-masing dan dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Adita, 2014). Suatu daerah yang diberikan kepercayaan dan kesempatan untuk mengatur secara mandiri segala hal-hal yang berkaitan dengan daerah tersebut, maka kemungkinan daerah untuk bertumbuh akan semakin cepat. Pemerintah daerah juga dapat mengalokasikan sumber-sumber pendapatan dan belanja daerah sesuai

dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Masyarakat tentunya berharap pemerintah mampu menggunakan sumber daya yang ada secara tepat sasaran demi terciptanya pelayanan yang nyaman bagi masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).

Pelaksanaan otonomi daerah berimbas pada pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena berguna untuk memaksimalkan penerimaan daerah demi kemakmuran kehidupan masyarakat. APBD dapat digunakan untuk menjalankan program kerja yang sudah dirancang sesuai keputusan para pejabat daerah. Kenyataannya, tidak jarang perancangan APBD sejalan dengan kepentingan politis dan birokrasi pemerintahan. Konflik kepentingan ini dijumpai oleh sebuah teori yaitu Teori Pilihan Rasional. Teori ini berupaya menjadi solusi antara ekonomi menengah dan politik dengan memperhatikan perilaku masyarakat, pelaku politik, dan wakil rakyat serta melihat bagaimana memilih sikap yang tepat untuk perumusan kegiatan publik yang ditetapkan seperti penyusunan APBD.

APBD tersusun atas komponen penerimaan daerah dan belanja daerah. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan bagian dari sumber-sumber pendapatan daerah. Sedangkan pengeluaran daerah yang dilakukan berupa belanja daerah (Vegirawati, 2012). Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan tentang belanja adalah semua pembiayaan yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang meminimalisir Saldo Anggaran berebih dalam siklus tahun anggaran

bersangkutan dan tidak memperoleh pengembalian pembayaran oleh pemerintah. Belanja dapat dikelompokkan menurut ruang lingkup ekonomi, meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, dan Transfer.

Strategi alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah memegang peranan yang begitu penting dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terdiri dari Belanja Modal dan Belanja Rutin. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdiri atas Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Lainnya, seperti pembenahan infrastruktur bidang pendidikan, kendaraan publik, kesehatan yang menyebabkan masyarakat turut serta merasakan dampak positif dari pembenahan tersebut. Pengalokasian Belanja Modal berpedoman pada keperluan terhadap adanya infrastruktur yang layak demi memudahkan kegiatan operasional pemerintah serta sarana umum. Pengalokasian belanja seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan mutu pemberian jasa kepada masyarakat. Alokasi belanja sebaiknya digunakan untuk kegiatan yang berdampak jangka panjang, seperti membangun sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah aktiva tetap sehingga bermanfaat tidak hanya dalam satu siklus akuntansi, beserta dengan pembiayaan untuk pemeliharaan yang bersifat meningkatkan kegunaan dari aktiva tersebut (Andaiyani, 2012).

Badrudin (2011) mengatakan suatu daerah yang memiliki IPM tinggi bukan berarti hanya bersumber dari alokasi belanja yang diterapkan oleh pemerintah. IPM yang besar tidak selalu ditentukan dari jumlah PAD dan pengeluaran daerah yang besar. Perolehan IPM yang besar didapatkan dengan

cara mandiri oleh masyarakat dan ditentukan dari keadaan perekonomian, sosial dan adat istiadat setempat. Peningkatan IPM dapat dilakukan dengan menggali sumber-sumber pendapatan daerah dan pengalokasian pengeluaran daerah yang benar. Berdasarkan fenomena tersebut penulis mencoba untuk menganalisis “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali)”.

Rumusan masalah penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang tersebut adalah: Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Manfaat yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian yang sudah dipaparkan di atas adalah penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk memperluas pengetahuan dan pengertian lebih terperinci tentang bagaimana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi penelitian berikutnya yang serupa. Di samping itu juga, penelitian ini semoga dapat membuka pikiran dan pemahaman Pemerintah Daerah yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam penetapan strategi yang tepat sasaran untuk memperoleh sumber pendapatan daerah yang terus meningkat agar dapat meningkatkan Belanja Daerah untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Teori Pilihan Rasional adalah teori ekonomi neoklasik yang diimplikasikan untuk sektor publik dan berupaya memisahkan antara ekonomi menengah dan politik dengan memperhatikan perilaku masyarakat, pelaku politik, dan wakil rakyat sebagai perumpamaan pada keperluan perseorangan dan pengguna jasa/barang (Buchanan, 1972). Oleh karenanya, kita kembali memperhatikan dan berupaya memahami bagaimana Adam Smith sebagai pengarang *The Wealth of Nation* (1776), memaparkan tentang “orang yang berperilaku demi mengejar kepentingan perseorangan, melalui prosedur “*the invisible hand*” sehingga menciptakan keuntungan kolektif yang berguna untuk segala lapisan masyarakat”. Buchanan dan Tullock (1962) memaparkan terdapat dua asumsi teori pilihan rasional, yaitu pribadi yang kebanyakan sangat berkeinginan untuk menambah *utilitas* (daya guna). Hal ini dapat diartikan bahwa individunya lebih mengacu terhadap berbagai pilihan yang dapat menambah kegunaan dan mengurangi biaya. Berikutnya yaitu, bukan kolektif yang menentukan keputusan, melainkan keputusan perseorangan. Tindakan ini biasa disebut sebagai metodologis individualisme dan beranggapan bahwa keputusan kolektif adalah bagian dari pilihan perseorangan.

Teori *Fiscal Federalism* atau Federalisme fiskal adalah studi hubungan keuangan antar tingkatan pemerintah dimana sistem ini menggunakan program pemerintah yang meletakkan pada tingkat pemerintah yang berbeda. Berawal dari sebuah prinsip-prinsip yang dapat diterapkan untuk semua negara yang berusaha mengaplikasikan desentralisasi fiskal. Konsep dari federalisme fiskal adalah pemerintah tingkat II (Kabupaten/Kota) adalah perwakilan yang diberikan

kewenangan oleh pemerintah pusat atau dapat diartikan pada kebanyakan negara yang berbentuk federal dimana tidak menjadikan pemerintahan negara sebagai bagian dari pelaku otonom (Prasetyia, 2013). Teori *Fiscal Federalism* adalah teori yang berupaya memberi pemahaman mengenai bagaimana pengaruh desentralisasi dengan situasi ekonomi, pelayanan kepada masyarakat umum dan kemakmuran masyarakatnya. *Fiscal Federalism Theory* terdiri dari dua perspektif teori, yaitu perspektif tradisional (*Traditional Theories*) dan perspektif baru (*New Perspektif Theories*).

Peraturan mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang didapat oleh Daerah berlandaskan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah di suatu daerah berhak menggali potensi yang terdapat pada daerahnya guna menjalankan sistem pemerintahan dan memenuhi kebutuhan publik, agar perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2004 memaparkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak yang dipungut oleh Daerah. Peraturan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 memberikan pemahaman mengenai pajak daerah yaitu kontribusi rutin yang harus dilakukan kepada daerah yang bersifat memaksa karena yang menjadi terutang adalah orang pribadi atau badan, dengan tidak memperoleh pengembalian saat itu juga serta digunakan untuk kepentingan di daerah sehingga dapat memakmurkan masyarakat. Kedua, retribusi Daerah adalah suatu pungutan yang dilakukan daerah yang memiliki arti

sebagai pelunasan terhadap jasa atau izin sesuai ketentuan yang khusus disediakan pemerintah di daerah demi keperluan khalayak luas, baik orang perseorangan atau badan sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009. Jasa sebagaimana dimaksudkan dalam UU tersebut yaitu program kerja pemerintah daerah berbentuk usaha dan pelayanan yang mampu menghasilkan suatu benda, infrastruktur atau kegunaan lain sehingga dapat digunakan oleh orang perseorangan atau badan. Ketiga hasil yang diperoleh dari badan usaha milik daerah serta perolehan dari sumber-sumber kekayaan milik daerah yang dibedakan. Selain pendapatan atas pajak serta retribusi daerah, pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari laba BUMD yang dimiliki. Yovita (2011) mengatakan BUMD mempunyai tujuan yang sangat berguna dalam rangka menciptakan suatu kesempatan kerja dan menggenjot perbaikan pembangunan ekonomi daerah. Disamping itu, BUMD merupakan cara yang sangat tepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan merupakan penyumbang sumber pendapatan bagi daerah. Terakhir adalah lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari pendapatan daerah selain Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan BUMD.

Menurut Permendagri No. 37 tahun 2014, sumber lain-lain PAD yang sah, dibagi menjadi pemasukan dari perolehan pengelolaan dana bergulir yang dijadikan investasi jangka panjang tidak permanen, dimasukkan ke dalam akun pendapatan, bagian dari PAD, lain-lain PAD yang sah, obyek perolehan Pengelolaan Dana Bergulir berikut dengan rincian dari bagian masyarakat penerima. Selanjutnya terdapat juga pendapatan yang diperoleh dari bunga atau jasa giro yang bersumber dari dana yang dicadangan, dialokasikan dalam akun

pendapatan, bagian dari PAD, lain-lain PAD yang sah, jasa giro dana cadangan atau obyek bunga berikut dengan rinciannya sesuai dengan peruntukannya. Ketiga kepemilikan pemerintah daerah yang belum mengimplementasikan PPK-BLUD yaitu pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang menjadi pedomannya adalah Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ pada tanggal 5 Mei 2014 terkait dengan Pedoman Pengalokasian, Penggunaan dan Pengelolaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

Belanja Modal merupakan pembiayaan yang digunakan biasanya lebih dari satu tahun pengalokasian anggaran dan dipastikan menambah aktiva atau harta pemerintah sehingga akan meningkatkan alokasi rutin untuk pembiayaan operasional berikut pemeliharannya. Alokasi belanja modal berarti mengalokasikan setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang ada di daerahnya. Menurut (Syaiful, 2008) Belanja Modal terdiri dari 5 (lima) kategori primer, diantaranya Belanja Modal untuk pembelian Tanah, Belanja Modal untuk penambahan Peralatan dan Mesin, Belanja Modal untuk penambahan fasilitas Gedung serta Bangunan, Belanja Modal untuk perbaikan Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Belanja Modal Fisik yang tidak termasuk dalam 4 belanja modal yang telah disebutkan di atas. Suatu belanja yang dapat dikatakan sebagai belanja modal ketika pengeluaran yang dilakukan berimbas pada

terbentukannya perolehan aktiva tetap atau aktiva lainnya yang meningkatkan umur ekonomis, kegunaan dan daya tampung pengeluaran yang dilakukan dapat melebihi batas minimal kapitalisasi aktiva tetap atau aktiva lainnya yang ditentukan pemerintah serta tidak untuk diperjualbelikan pada khalayak luas.

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh daerah untuk memenuhi segala pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. PAD berasal dari pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak di daerah tersebut, retribusi daerah, BUMD, dan pendapatan lain yang disahkan. Strategi suatu daerah dalam menyajikan rancangan dana yang bersumber dari daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mengelola segala peluang ekonomi daerah tersebut menjadi suatu tindakan ekonomi yang bisa memberikan perputaran dana bagi kesinambungan pembangunan yang ada di daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007). Pembangunan suatu daerah yang dilakukan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiscal daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan. Hal ini menuntut setiap daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah (Pamudi, 2008). PAD menjadi salah satu bagian yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan ekonomi daerah. Hal ini berarti besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012).

Garansi yang diperoleh untuk pencapaian tujuan dari pembangunan manusia harus ada empat elemen yang sangat diperhitungkan, yaitu produktivitas masyarakat, pemerataan yang dilakukan dalam segala bidang, keberlanjutan dari

suatu program kerja dan pemberdayaan terhadap masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam UNDP tahun 1995. Terdapat tiga unsur dasar untuk peningkatan pembangunan manusia yang dijadikan acuan dalam pengukuran IPM adalah lamanya hidup, ilmu yang dimiliki, dan kategori hidup layak dan berkecukupan.

Unsur dasar pembangunan manusia yang pertama adalah lamanya hidup. Lamanya hidup seseorang diartikan sebagai seberapa lama maksimal usia yang diinginkan manusia untuk tetap bertahan menjalani kehidupan. Pembangunan manusia diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat agar memiliki umur yang panjang. Unsur dasar pembangunan manusia yang ke-2 adalah ilmu yang dimiliki. Ilmu pengetahuan serta pendidikan menjadi indikator dasar dari pencapaian pembangunan manusia yang diharapkan. Faktor lainnya dapat dilihat dari kemampuan masyarakat untuk membaca, berapa lama jenjang pendidikan yang pernah ditempuh, keinginan untuk melanjutkan sekolah, angka berhenti bersekolah dan lain-lain. Unsur ke-3 yang selanjutnya perlu diperhatikan adalah kategori hidup layak dan berkecukupan yang dapat dilihat melalui seberapa banyak penduduk yang memiliki penghasilan layak, sedikit pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita.

Penilaian IPM dapat dilihat dari rentang angka 0 hingga 100. Apabila perolehan angka IPM dekat dengan angka 100, maka dapat diprediksi pembangunan manusia di suatu daerah sudah tercapai (Ndakularak dkk, 2014). IPM dapat dibagi menjadi 4 kategori sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS, diantaranya: Kategori bawah yang perolehan IPM tidak lebih dari 50 ($IPM < 50$), selanjutnya kategori kedua yaitu rata-rata rendah dengan perolehan IPM lebih dari

50 akan tetapi tidak lebih dari 66 ($50 < IPM < 66$), Kategori ketiga adalah rata-rata atas yang perolehan IPM lebih dari 66 akan tetapi tidak lebih dari 80 ($66 < IPM < 80$), Kategori terakhir adalah kategori atas/tinggi yang perolehan IPM lebih dari 80 ke atas ($IPM > 80$).

Tingkat kemandirian suatu daerah terlihat dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya. Jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Tujuan utama pembangunan daerah selain kemandirian fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik melalui pembangunan manusia yang diukur melalui IPM (Pamudi, 2008).

PAD memiliki peran yang sangat penting terhadap IPM, dengan kata lain PAD berpengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Peningkatan PAD yang diterima pemerintah daerah berarti daerah memiliki cukup dana untuk belanja daerah pada sektor-sektor yang mendukung IPM seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Pamudi (2008), Setyowati dan Suparwati (2012), dan Lugastro (2013) yang mengatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

$H_{a.1}$: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Diterimanya penerimaan yang diperoleh dengan manajemen kekayaan daerah seperti PAD beserta hibah uluran tangan dari pemerintah pusat yang berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, dapat dipastikan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk seharusnya juga akan tercapai. Christy dan

Adi (2009) menyatakan untuk meningkatkan kemajuan daerah dan mensejahterakan masyarakat daerah diperlukan pengalokasian dan belanja modal yang lebih besar berupa pembenahan bangunan dan infrastruktur yang memadai. Peningkatan infrastuktur publik dan penanaman modal pemerintah seperti pembenahan segala penunjang pendidikan, kesehatan dan prasarana lain sehingga dapat memaksimalkan pelayanan sektor publik secara berkesinambungan (Bati, 2009). Hal tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dialokasikan berdasarkan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana daerah, disamping itu juga untuk mendapatkan aset tetap daerah (Solikin, 2007). Belanja modal dilakukan oleh Pemda (Pemerintah Daerah) dalam pengadaan aset daerah sebagai investasi, pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya peningkatan sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Belanja modal memiliki peran yang penting terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Christy dan Adi (2009); Kusreni dan Suhab (2009); Setyowati dan Suparwati (2012); dan Mirza (2012), mengatakan alokasi belanja modal memberi dampak positif pada indeks pembangunan manusia. Berlandaskan dengan penelitian sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{a.2}: Alokasi Belanja Modal berpengaruh positif pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

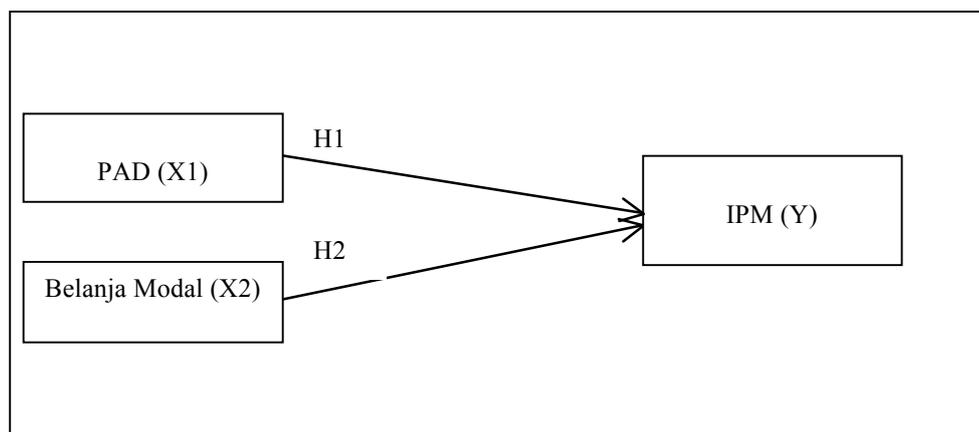
METODE PENELITIAN

Berpedoman dari rumusan masalah serta telah dijelaskannya paparan hipotesis di atas, maka variabel yang digunakan untuk menunjang penelitian yaitu Pendapatan

Asli Daerah dan Belanja Modal sebagai variabel independen serta Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bertindak sebagai variabel Dependen.

Penelitian yang dilakukan berpedoman pada pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif yang berkeinginan untuk meneliti bagaimana keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah Bali. Pendekatan kuantitatif merupakan tahapan penelitian yang dipakai untuk mencari kebenaran populasi atau sampel tertentu yang berguna untuk menguji apakah hipotesis yang dibuat sudah sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

Berikut ini merupakan gambar desain penelitian dalam bentuk skema yang menunjukkan bagaimana model variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal memengaruhi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di daerah Bali.



Gambar 1. Desain Penelitian

Sumber: Data Diolah, 2015

Laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah yang terdapat di Provinsi Bali pada tahun 2009-2013 serta data IPM daerah Bali pada tahun 2008-2013 merupakan obyek penelitian dari penelitian ini. Alasan penggunaan tahun tersebut

karena adanya ketidakkonsistenan peningkatan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali dari tahun ke tahun yang mengindikasikan penerimaan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dalam bentuk Laporan Realisasi APBD tahun 2009-2013 dan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2008-2013 yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Bali. Data IPM terbaru adalah 2013, sementara IPM tahun 2014 belum dipublikasikan.

Teknik penumpulan data pada penelitian ini adalah observasi non partisipan. Data yang dikumpulkan melalui observasi non partisipan dengan cara melakukan pengamatan terkait dengan data dan juga catatan penting yang diperoleh dari pihak lain sehingga dapat mendukung penelitian ini dengan cara meniru, mencatat, serta merangkum dokumen yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali serta diperkuat dengan hasil analisis yang dilakukan peneliti terdahulu dan sumber bacaan terkait yang menjadi acuan kalayakan hasil penelitian. Pengambilan sampel penelitian yang ditentukan peneliti memiliki beberapa kriteria. Kriteria sampel yang perlu diperhatikan adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali melaporkan realisasi APBD tahun 2009-2013 dan data IPM dari tahun 2008-2013.

Penelitian ini menggunakan teknik Analisis Regresi Berganda yang sebelumnya harus melalui Uji Asumsi Klasik meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi agar data

dianggap layak dilanjutkan ke analisis berikutnya. Berikut adalah rumus model regresi linear berganda sesuai dengan jumlah variabel dalam penelitian.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah
- β_2 = Koefisien regresi Belanja Modal
- X_1 = Pendapatan Asli Daerah
- X_2 = Belanja Modal
- e = Nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bali adalah bagian dari kepulauan yang ada di Indonesia. Provinsi Bali dikategorikan sebagai salah satu penyumbang aset pariwisata terbesar di Indonesia. Bali atau yang sering disebut dengan Pulau Seribu Pura ini sering dikunjungi turis lokal Indonesia maupun turis mancanegara karena keindahan alam, keramahan penduduknya dan keunikan budayanya. Oleh karenanya sebagian besar sumber pendapatan penduduk Bali bersumber dari sektor pariwisata. Secara administratif Provinsi Bali terbagi atas 8 Kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Karangasem, Klungkung, Jembrana, Bangli, Buleleng, dan 1 Kota yaitu Kota Denpasar dengan populasi penduduk mencapai 2.968.933 jiwa.

Provinsi Bali merupakan bagian dari Indonesia yang menggunakan kebijakan Otonomi Daerah. Penerapan kebijakan ini mengharuskan tiap-tiap daerah baik provinsi, kabupaten/kota lebih mempunyai wewenang untuk

mengelola sendiri urusan pemerintahan tanpa adanya keikutsertaan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengambil langkah dan mengelola sendiri segala kepentingan pemerintahan di daerah termasuk mengalokasikan belanja modal dan belanja rutin sesuai dengan arah dan tujuan untuk terciptanya masyarakat yang makmur, pelayanan kepada masyarakat yang maksimal, peningkatan daya saing, dan peningkatan keikutsertaan penduduk.

Peningkatan IPM yang terjadi di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali berfluktuasi setiap tahunnya. Dilihat secara keseluruhan IPM Provinsi Bali berada di peringkat 16 dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2012, dengan capaian IPM sebesar 73,50 dan tahun 2013 berada pada peringkat 15 dengan peningkatan sebesar 0,59 menjadi 74,09. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali yang terus meningkat setiap tahunnya.

Cakupan dalam penelitian ini berjumlah 8 Kabupaten dan 1 Kota yang terdapat di Provinsi Bali dengan menggunakan data runtutan waktu dari tahun 2009 sampai dengan 2013 sehingga jumlah data secara keseluruhan adalah 45 amatan (9 Kabupaten/Kota x 5 tahun).

Berdasarkan Hasil Uji Asumsi Klasik yang pada awalnya dilakukan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi menunjukkan hasil yang menyatakan bahwa data layak dilanjutkan ke dalam model regresi.

Pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan ditinjau terlebih dahulu

mengenai deskripsi variabel penelitian dengan analisis statistik deskriptif. Nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum dapat dilihat dengan melakukan peninjauan terhadap Statistik deskriptif. Pada Tabel 4 ditunjukkan hasil analisis deskriptif dari penelitian ini.

Tabel 4.
Hasil Analisis Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| PAD | 45 | 16.252.951.099 | 2.279.110.000.000 | 290.907.684.451 | 484.129.309.526 |
| AB_modal | 45 | 42.555.098.646 | 766.712.000.000 | 145.220.122.014 | 139.896.659.216 |
| IPM | 45 | -2,47 | 3,33 | 0,5169 | 0,63928 |
| Valid N (listwise) | 45 | | | | |

Sumber: Data Diolah, 2015

Berdasarkan hasil pengolahan data Tabel 4 diatas diketahui bahwa PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memiliki *mean* sebesar Rp 290.907.684.451 dengan nilai minimum sebesar Rp 16.252.951.099 dan maksimum sebesar Rp 2.279.110.000.000. PAD maksimum ini diperoleh oleh Kabupaten Badung, sedangkan PAD minimum adalah Kabupaten Bangli, hal ini menandakan apabila Kabupaten Badung berhasil menggali potensi-potensi sumber daya daerah yang ada sehingga meningkatkan pendapatan daerahnya.

Alokasi belanja modal paling tinggi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebesar Rp 766.712.000.000,00 yaitu Kabupaten Badung, sedangkan belanja modal terendah Rp 42.555.098.646 dan perolehan rata-rata belanja modal adalah Rp 145.220.122.014,6. Belanja modal maksimum adalah Kabupaten Badung, sedangkan pengalokasian Belanja modal minimum adalah Kabupaten Klungkung. Pengalokasian belanja modal Kabupaten Badung ini sejalan dengan besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh.

Pencapaian peningkatan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi yaitu berada pada tingkat 3,33, sedangkan peningkatan terendah yang pernah tercatat yaitu pada tingkat -2,47 dan 0,5169 merupakan rata-rata peningkatan IPM dari hasil statistik deskriptif penelitian ini. Peningkatan IPM maksimum dan minimum ini sama-sama diperoleh oleh Kabupaten Badung karena pada tahun 2010 Peningkatan IPM Kabupaten Badung menurun drastis mencapai angka -2,47.

Tabel 4 akan menunjukkan bagaimana Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali memengaruhi Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada hasil analisis regresi berikut.

Tabel 5.
Hasil Uji SPSS

| Variabel | Koefisien Regresi | Sig. |
|--------------|------------------------|-------------|
| (Constant) | 0,001 | 0,989 |
| PAD | 0,021 | 0,000 |
| BelanjaModal | 0,022 | 0,000 |
| | | F = 140,003 |
| | R ² = 0,863 | Sig = 0,000 |

Sumber :Data Diolah, 2015

Sesuai dengan data yang tercantum pada Tabel 5 dapat dibuat persamaan regresi dari penelitian adalah:

$$IPM = 0,001 + 0,021 \text{ PAD} + 0,022 \text{ Belanja Modal}$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterpretasikan Koefisien konstanta memiliki nilai 0,001 berarti bahwa ketika PAD dan belanja modal konstan sehingga akan berpengaruh pada Peningkatan IPM yang akan naik sebesar 0,001 persen.

Oleh karena nilai dari koefisien regresi PAD menunjukkan angka 0,021, maka memiliki arti bahwa saat PAD mengalami peningkatan berjumlah satu

persen, akan mempengaruhi peningkatan IPM sebesar 0,021 persen dengan ketentuan apabila variabel lainnya tidak berubah.

Oleh karena nilai dari koefisien regresi Belanja Modal menunjukkan angka 0,022, maka memiliki arti bahwa saat Belanja Modal mengalami peningkatan berjumlah satu persen, akan mempengaruhi peningkatan IPM sebesar 0,022 persen dengan ketentuan apabila variabel lainnya tidak berubah.

Dari Tabel 5 terlihat hasil pengukuran koefisien determinasi sebesar 0,863. Hal ini memiliki arti bahwa hanya 86,3 persen peningkatan IPM dapat dilihat pengaruh yang disebabkan oleh variabel PAD dan belanja modal. Sisanya sebesar 13,4 persen dijelaskan oleh variabel yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan data Tabel 5 terlihat bahwa nilai F sebesar 140,003 dengan tingkat hasil signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena *p-value* yang dihasilkan yaitu 0,000 (< 0.05) sehingga hipotesis dari penelitian ini dapat diterima. Hipotesis alternatif diterima, artinya model regresi dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan IPM atau dengan kata lain variabel PAD dan belanja modal berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu peningkatan IPM.

Hasil pengujian yang diperoleh dari pengaruh PAD (X1) terhadap Peningkatan IPM (Y) yaitu sebesar 0,000 tidak lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan pada Peningkatan IPM. Nilai koefisien regresi PAD (X1) pada Tabel 4.10 menunjukkan adanya pengaruh positif PAD pada Peningkatan IPM. Hasil ini berarti bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM. Artinya, semakin meningkat PAD, maka peningkatan IPM juga semakin

meningkat. Penelitian ini memperoleh hasil yang serupa dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) berjudul “Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan hasil Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah akan berkontribusi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selanjutnya Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur untuk keperluan publik seperti, perbaikan sarana penunjang kesehatan, pendidikan dan fasilitas umum. Provinsi Bali dapat dikatakan berhasil mengelola segala potensi Pendapatan Asli Daerah dibarengi dengan pengeluaran keseluruhan PAD tersebut untuk membiaya biaya modal sehingga tanpa disadari dapat menaikkan tingkat IPM di Provinsi Bali. Ada baiknya apabila kesuksesan pemerintah daerah untuk meraih predikat suatu daerah dapat dikatakan mandiri harus mendapat penghargaan karena inilah gambaran dan tujuan dari diadakannya desentralisasi atau otonomi daerah.

Perolehan pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh belanja modal (X2) terhadap Peningkatan IPM (Y) didapat p-value sebesar 0,000 tidak lebih besar dari $\alpha = 5\%$. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan pada Peningkatan IPM. Nilai yang tercantum pada koefisien regresi belanja modal (X2) memperlihatkan suatu hasil yang positif belanja modal pada Peningkatan IPM. Perolehan hasil pengujian ini memperlihatkan apabila belanja modal memiliki pengaruh yang positif dan

signifikan pada Peningkatan IPM. Artinya, semakin meningkat belanja modal, maka peningkatan IPM juga semakin meningkat. Hasil yang berbeda dilakukan oleh Paramita (2012) yang memperoleh hasil belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan pada IPM. Penelitian yang dilakukan Adita (2014) juga mengungkapkan apabila belanja modal tidak memiliki pengaruh pada IPM. Hasil penelitian ini memiliki hasil yang serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mirza (2012) dengan hasil yang diperoleh, yaitu belanja modal mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada IPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hal ini berarti, semakin meningkat Pendapatan Asli Daerah, maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat. Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada Peningkatan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Hal ini berarti, semakin meningkat belanja modal, maka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.

Hasil penelitian ini semoga dapat membuka wawasan dan pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat membantu dan menjadi acuan bagi penelitian berikutnya yang serupa. Membuka cakrawala informasi kepada Pemerintah Daerah untuk sumber-

sumber pendapatan daerah yang dimiliki sehingga mampu menambah belanja daerah untuk kepentingan umum khususnya bagi pembangunan manusia

Berdasarkan hasil kesimpulan, saran yang dapat peneliti berikan, yaitu Pemerintah Daerah diharapkan melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan Indeks Peningkatan Manusia melalui alokasi belanja yang tepat, seperti pengalokasian dana untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2013. Pemerintah daerah Provinsi Bali harus mencapai presentase belanja modal sebesar 30 persen sesuai dengan Permendagri No 13 Tahun 2006 dan diharapkan dapat mengalokasikan Belanja Modal dengan sebijak mungkin dan melaporkan pengeluaran yang dilakukan pemerintah secara transparan demi meningkatnya pembangunan masyarakat yang dilihat dari masyarakat yang sejahtera dengan dibarengi perbaikan infrastruktur di bidang kesehatan, pendidikan dan perekonomian karena IPM Provinsi Bali berada diperingkat 16 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Saran terakhir yang dapat diberikan, yaitu diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan data tahun 2014 karena dapat memberi bayangan bagaimana perkembangan terbaru kualitas pembangunan manusia di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Adita Wahyu, I Putu. 2014. Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.
- Ahmad, Abd.R., Alan Farley and Moonsamy Naidoo. 2012. *Analysis of Government-University Relationship from the Perspective of Agency Theory*. *Journal of Education and Practice*, 3(6).

- Agusti, Chalendra Prasetyia. 2013."analisis faktor yang mempengaruhi kemungkinan financial distress perusahaan manufaktur yang terdaftar BEI periode 2008-2011". Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Amagoh, Francis and Aloysius Ajab Amin. 2012. *An Examination of the Impacts of Fiscal Decentralization on Economic Growth. International Journal of Business Administration*, 3(6), pp: 72-81.
- Andaiyani. 2012. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Tesis*. Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura.
- Aristovnik, A. 2012. *Fiscal decentralization in Eastern Europe: a twenty-year perspective*. MPRA Paper No. 39316, University of Ljubljana, Faculty of Administration, Slovenia.
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach*. *MRG@UQ Discussion Paper*, School of Economics, University of Queensland.
- Bati.2009. Pengaruh Belanja Modal dan PAD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi PADA Kabupaten dan Kota di Sumatra Utara). Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- BPS. 2008. Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____. 2012a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Gini Ratio dan Distribusi Pendapatan Bali. Denpasar: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.
- _____. 2012b. Indeks Pembangunan Manusia 2010-2011. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Buchanan, James and Tullock, Gordon. 1962. *The Calculus of Consent*. University of Michigan, Ann Arbor.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi.2009. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd Natonal Conference UKWMS Surabaya*.
- Darwanto dan Yustikasari. 2006. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Studi Kasus Kabupaten /Kota se-Jawa Bali tahun 2004-2005.

- Davoodi, H. and Zou, H.F. 1998. Fiscal Decentralization and Economic Growth: A CrossCountry Study. *Journal of Urban Economics*, 43: 244-257.
- Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri.2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Heckathorn, Douglas D. 2001. 'Sociological Rational Choice', dalam George Ritzer dan Barry Smart (Ed.). *Handbook of Social Theory*. London: Sage Publications.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976.*Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360. Available from:<http://papers.ssrn.com>
- Kusreni, Sri dan Sultan Suhab. 2009. Kebijakan APBD dan Kesejahteraan Masyarakat di provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*,5(3), h: 1-15.
- Lugastoro, Decta Pitron. 2013. Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 1(2), h: 01-19.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(1), h:1-15.
- Ndakularak, Erwin, Nyoman Djinar Setiawina dan I Ketut Djayastra, 2014. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(3), h: 140-153.
- Olatunji, O.C., O.Asaolu Taiwo and J.O.Adewoye. 2009. *A Review of Revenue Generation in Nigeria Local Government: A Case Study of Ekiti State. Journal of Internasional Business Management*, Vol.3, Issue 3, pp: 54-60.
- Pamudi, Septian Bagus. 2008. Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian, Bogor*.
- Paramita, Ahsani. 2012. Analisis Dampak Realisasi APBD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Makassar Periode 2000-2009. Makassar : Universitas Hasanuddin.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Rahyuda, I Ketut, IGW Murjana Yasa dan I Nyoman Yuliarmi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Denpasar : Universitas Udayana Press.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Republik Indonesia, Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Republik Indonesia, Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Sari, A.K., 2011, Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan

Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati, 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Pretasi. Juni 2012, 9(1), h: 113-133.

Smith, Adam, Theory of the Moral Sentiments, (1723-1790). The Wealth of Nations.

Solikin, Ikin. 2007. Hubungan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal di Jawa Barat.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Syaiful, 2008. *Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal Dalam Kaidah Akuntansi pemerintahan*. www.bappenas.go.id

Tiebout, Charles M. 1956. A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), pp: 416-424.

UNDP. 2004. Indonesia, Indeks Pembangunan Manusia. <http://www.undp.or.id>, diakses pada tanggal 10 April 2015.

Utama, Suyana. 2009. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Sastra Utama.

Vegirawati, Titin. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kota di Sumatra Selatan). *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS)*. 2(1), h: 65-74.

Yovita, Farah Marta. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja